BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2..1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan

Laporan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu termasuk laporan yang diterima secara resmi maupun laporan yang masuk dari mulut ke mulut.

Jika dalam kehidupan sehari-hari laporan ini biasa kita kenal dengan istilah pengaduan, dimana pengaduan disini yang nantinya akan menimbulakan percecokan atau membawa manfaat kebaikan sangat tergantung dari si pemberi informasi atau bagaimana cara menagkap informasi tersebut.

Dari gambaran tersebut dapat kita ketahui bertapa pentingnya peranan laporan dalam kehidupan sehari-hari apalagi jika laporan tersebut menyangkut kehidupan suatu perusahaan atau instansi.

Menurut **F X Soedjadi** (1988) mendefinisikannya sebagai berikut :

Laporan adalah :

1. **"Suatu panyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang *authority* dan tanggung jawab *responsibility* yang ada antara mereka.**
2. **Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya."**

Pengertian laporan menurut **The Oxford English Dictionary dalam kusumah**, dkk (2002: 2:3) adalah :

a. **"cerita yang dibawakan seseorang kepada orang lain yang diteliti secara khusus.**
b. **Pernyataan formal hasil penelitian, tentang sesuatu hal yang memerlukan informasi yang pasti, dibuat oleh seseorang atau sebuah lembaga atau harus melakukannya."**

Sedangkan **Siswanto** (1989 : 62) memberikan batasan tentang *report* yaitu :

"sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Laporan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu macam dokumen yang disampaikan atau menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diseliki, dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan pada pemikiran atau tindakan yang akan diambil."

Sejalan dengan pendapat **Keraf, Parera** (1987 :56) mengemukakan:

"laporan pada dasarnya suatu bentuk penyampaian dan perjanjian fakta-fakta dan pemikitran-pemikiran guna tindakan."

Dari beberapa pendapat pengertian laporan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyampaian dan penyajian hasil kegiatan baik secara lisan maupun tertulis dan dokomen berupa fakta-fakta yang dimanfaatkan guna mengambil sebuah keputusan atau tindak lanjut bagi seseorang atau lembaga atau instansi tertentu.

2.1.1.1 keuangan

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat mempelancar kegiatan operasinya.

Menurut **Ridwan S. Sundjaja** dan **Inge Barliana** (2002 : 34), pengertian keuangan sebagai berikut :

> **"keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubunngan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam *transfer* uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah."**

2.1.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut **Deddy Nodiawan** (2007 : 151)

"**Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas."**

Menurut **Sofyan Syafri Harahap** (2007 : 19)

"laporan keuangan dalam suatu perusahaan sebenarnya merupakan *output* dari proses atau siklus akuntansi dalam suatu kesatuan akuntansi usaha, dimana proses akuntansi meliputi kegiatan-kegiatan :

1. **Mengumpulkan bukti bukti transaksi**
2. **Mencatat transaksi dalam jurnal**
3. **Memposting dalam buku besar dan membuat kertas kerja**
4. **Menyusun laporan keuangan"**

Pengertian laporan keuangan menurut **Baridwan** (1992 : 17)

"laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan."

Menurut **Sundjaja** dan **Barlian** (2001 : 47)

> **"laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan."**

Sedangkan definisi laporan keuangan menurut **Munawir** (1991 : 2)

> **"laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan."**

Dalam Pernyataan **Standar Akuntansi Pemerintahan 01-1** (2005) menyebutkan,

> "**disebutkan, Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga nampak sebagai satu entitas tunggal. Sedangkan, Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan."**

Selain itu juga, dalam **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01-1** (2005) menyebutkan,

> **"Laporan keuangan (untuk tujuan umum) adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti Laporan Tahunan."**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang bekepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermafaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi**
2. **Laporan keuangan yang disususn untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demiian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.**
3. **Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen *stewardship* atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai juga ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencangkup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.**

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut **Mardiasmo** (2002 : 161),

1. **“Kepatuhan dan Pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.**
2. **Akuntabilitas dan Pelaporan Rektrospektif. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk**

menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. **Perencanaan dan Informasi Otoritas. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.**
4. **Kelangsungan Organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa dimasa yang akan datang.**
5. **Hubungan Masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.**
6. **Sumber Fakta dan Gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam."**

Dalam Pernyataan **Standar Akuntansi Pemerintahan No.1** (2005) disebutkan,

"Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. **Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;**
2. **Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;**
3. **Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;**
4. **Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;**
5. **Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;**

6. **Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;**
7. **Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya."**

2.1.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam **Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan** (2005) disebutkan,

> **"karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran *normative* yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat *normative* yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :**
> 1. **Relevan**
> 2. **Andal**
> 3. **Dapat diperbandingkandan**
> 4. **Dapat dipahami."**

Karakteristik kualitati laporankeuangan menurut **PSAK** (2007),

> **"merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat beberapa karakteristik kualitatif pokok yaitu:**
>
> **1. Dapat dipahami**
> **Kualitas penting untuk informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, sulitnya memahami informasi yang komplek jangan dijadikan alasan untuk tidak memasukan informasi tersebut dalam laporan keuangan.**
>
> **2. Relevan**
> **Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat**

dan materialitas nya. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

3. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya pelaporan suatu segmen baru dapat dipengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa pertimbangan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Materialitas tergantung ada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal *(realible)*. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur.

5. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan informasi harus menggambarkan dengan jujur taransaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

6. Subtansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan untuk memakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

8. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang dirasakan, prakiraan masa manfaat pabrik serta

peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya kesengajaan untuk tidak dapat mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi titik benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan atau tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

10. Dapat Dibandingkan

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain itu juga pemakai harus dapat memperbandingkan lapora keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif."

2.1.1.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Didalam **PSAK No. 31** (2000) sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah :

1. **"Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lalu karena laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.**
2. **Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.**
3. **Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.**
4. **Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.**
5. **Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi suatu peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas).**
6. **Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami teknis dan sifat dari informasi yang dilaporkan.**
7. **Adanya berbagai altenatif metode yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan."**

Menurut **Jumingan** (2005: 10) empat keterbatasan laporan keuangan adalah :

1. **Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu, semua jumlahjumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang tidak menunjukan nilai realisasi dimana didalamnya terdapat pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan.**
2. **Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berbeda-beda. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep *going concern* sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.**
3. **Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan tersebut disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga.**
4. **Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.**

2.1.2 Arus kas

Laporan arus menurut **Deddi Noordiawan** (2007) :

"Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan."

Menurut **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2** (2009)

"Pengertian Laporan Arus kas adalah memeberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan *financing* selama suatu periode akuntansi"

Pengklasifikasian Laporan Arus Kas menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 24** (2005) pada pemerintah daerah adalah arus masuk dan keluar kas yang berasal dari :

1. **"Aktivitas Operasi yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi.**
2. **Transaksi Aktiva Tetap dan Aset Lainnya yaitu perolehan dan pelepasan Aktiva Tetap dan Aset Lainnya.**
3. **Aktivitas Pembiayaan yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran.**
4. **Aktivitas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM Khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat."**

2.1.2.1 Kegunaan Laporan Arus Kas

Kegunaan laporan arus kas menurut **PSAK 02** (2009) :

"laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah.
Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.
Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga."

2.1.2.2 Penyajian Laporan Arus Kas

Menurut **Standar Akuntansi Pemerintahan No. 03** (2005) entitas akuntansi dapat menyajikan arus kas dengan cara :

"(a)Metode Langsung
Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
(b)Metode Tidak Langsung
Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan."

Untuk penyusunan Laporan Arus Kas dalam SAKD, metode yang digunakan adalah Metode Langsung (Direct Method). Hal ini berarti arus kas yang berasal dari aktivitas operasi harus disusun dengan menyajikan seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran kasnya

Tabel 3.4
Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	**Arus Kas dari Aktifitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX
6	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	**Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 15)**	XXX	XXX
17	**Arus Kas Keluar**		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Hibah	XXX	XXX
23	Bantuan Sosial	XXX	XXX
24	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/kota	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	**Jumlah Arus Keluar kas (18 s/d 27)**	XXX	XXX
29	**Arus kas Bersih dari Aktifitas Operasi (16-28)**	XXX	XXX

No.	Uraian	20X1	20X0
30	**Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan**		
31	**Arus Masuk Kas**		
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainya	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset lainya	XXX	XXX
38	**Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 27)**	XXX	XXX
39	**Arus Keluar Kas**		
40	Belanja tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja jalan, Irigasi dan Jaringnan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap lainya	XXX	XXX
45	Belanja Aset lainnya	XXX	XXX
46	**Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)**	XXX	XXX
47	**Arus kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan (38-46)**	XXX	XXX
48	**Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan**		
49	**Arus Masuk Kas**		
50	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	XXX	XXX
53	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah lainya	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Daerah	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri-Lainya	XXX	XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
60	penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah daerah lainya	XXX	XXX
61	**Jumlah Arus Masuk Kas (50-60)**	XXX	XXX
62	**Arus keluar Kas**		
63	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainya	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan bank	XXX	XXX

No.	Uraian	20X1	20X0
69	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - lainnya	XXX	XXX
71	pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
74	**Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)**	XXX	XXX
75	**Arus kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan (61-74)**	XXX	XXX
76	**Arus Kas Dari Aktifitas Nonanggaran**		
77	**Arus Masuk Kas**		
78	Penerimaan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	**Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)**	XXX	XXX
80	**Arus Keluar Kas**		
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82	**Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)**	XXX	XXX
83	**Arus Kas bersih dari Aktifitas Nonanggaran (79 - 82)**	XXX	XXX
84	**kenaikan atau Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)**	XXX	XXX
85	**Saldo Awal Kas di BUD**	XXX	XXX
86	**Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)**	XXX	XXX
87	**Saldo Akhir Kas di Bedahara Pengeluaran**	XXX	XXX
88	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**	XXX	XXX
89	**Saldo Akhir Kas (86 + 87 +88)**	XXX	XXX

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP

1.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah provinsi jawa barat merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Menurut **Permendagri 13** (2006) entitas pelaporan adalah :

> **Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan."**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut **Permendagri 13** (2006) disebutkan :

> **"Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah."**

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki entitas akuntansi, salah satunya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Sekretariat daerah menurut **Permendagri 13** (2006) :

> **"Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur**."

Sekretariat Daerah Propinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi

Setiap Instansi Pemerintahan, terutama dalam hal melakukan kegiatan usahanya selalu mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dalam melakukan seluruh aktivitasnya harus selalu sesuai dengan rencana atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu suatu instansi harus selalu dimotivasi untuk melaksanakan kegiatannya secara bertanggung jawab dan terarah.

Dalam melaksanakan semua kegiatannya itu,suatu instansi tentunya sering dihadapkan pada masalah-masalah yang sering terjadi, baik itu mengenai tata

kelola, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan masalah yang serius, hal ini sangat menyangkut kemungkinan terjadinya kelalaian pada setiap pegawai di instansi tersebut.

Menurut **Permendagri 13** (2006) :

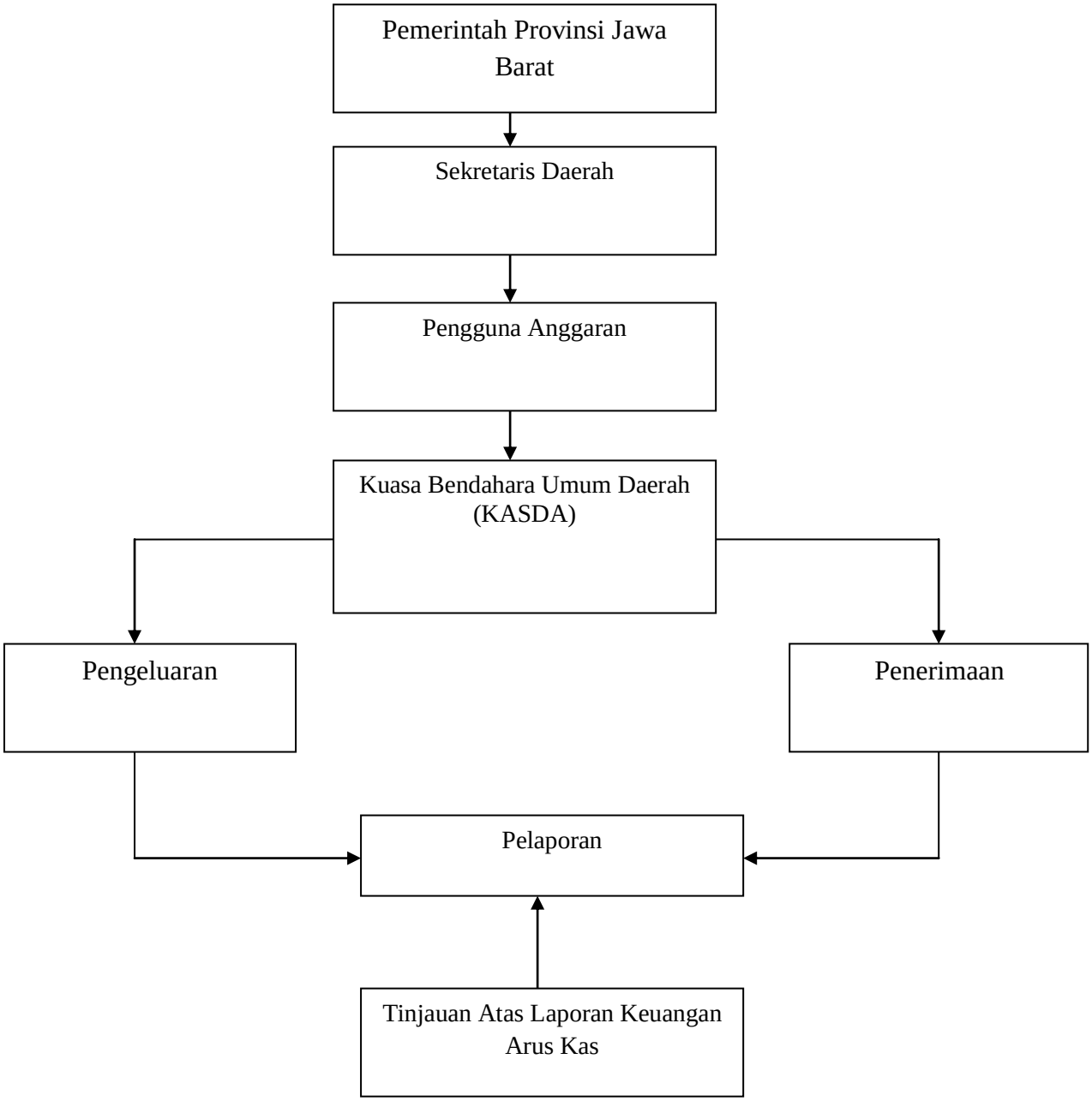
1. **"Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.**
2. **Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah."**

Oleh karena itu proses pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar dari bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*General Accepted Accounting principle*) seperti memperhatikan prinsip konsistensi, prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan informasi keuangan yang lelevan, dapat dimengerti dan dan dapat diverifikasi.

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 24** (2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa :

> **"laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan."**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memberikan infomasi keuangan secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders* agar terhindar dari kebiasaan karena kesalahan atas pengelolaan keuangan daerah, baik itu berupa kesalahan dalam pencatatan maupun penyelewengan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.



Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1